

Analisis Dampak Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Piutang Usaha Pada PT. PLN ULP Tomohon

Theresia Magdalena Kaunang¹, Lusye Corvanty Kumaat², Jufry Rompas³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado, Indonesia

E-mail: leccakaunang2@gmail.com¹, lusyeckumaat@yahoo.com², jufryrompas30@gmail.com³

Article History:

Received: 14 Mei 2026

Revised: 19 Juni 2026

Accepted: 26 Juni 2026

Keywords: *GCG, Accounts Receivable, Receivables Management, PT PLN (Persero)*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan piutang usaha pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness telah diterapkan dalam proses pengelolaan piutang usaha. Penggunaan aplikasi Executive Information System (EIS) membantu perusahaan dalam memantau data tagihan dan tunggakan pelanggan secara real time sehingga pengawasan dan penagihan piutang menjadi lebih efektif. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pembayaran pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengawasan internal dan monitoring piutang guna meminimalkan risiko piutang bermasalah.*

PENDAHULUAN

Dinamika dunia bisnis yang senantiasa berubah mengharuskan setiap perusahaan untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan, baik yang bersumber dari kemajuan teknologi, pergeseran kebijakan regulasi, maupun meningkatnya intensitas persaingan di lingkungan usaha. Dalam situasi seperti ini, perusahaan tidak semata-mata diharapkan mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga dituntut untuk menjaga kelangsungan operasionalnya dalam jangka panjang. Untuk itu, penerapan sistem tata kelola yang terstruktur menjadi kebutuhan mendasar agar seluruh aktivitas perusahaan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai arah yang telah ditetapkan. Tata kelola yang diterapkan secara baik juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengatur sekaligus mengendalikan jalannya organisasi agar selaras dengan tujuan perusahaan dan kepentingan para stakeholders. Konsep ini menempatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness sebagai landasan utama dalam setiap aspek kegiatan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendorong terbentuknya sistem manajemen yang lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, implementasi Good Corporate Governance turut memperkuat mekanisme pengendalian internal perusahaan, sehingga risiko terjadinya penyimpangan maupun kekeliruan dalam pengelolaan organisasi dapat

diminimalkan secara optimal (Sutriani et al., 2025).

Dalam praktiknya, penerapan *Good Corporate Governance* memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan piutang usaha. Piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Pengelolaan piutang usaha membutuhkan sistem administrasi dan pengawasan yang baik agar proses penagihan dapat berjalan secara optimal dan tidak mengganggu arus kas perusahaan. Apabila pengelolaan piutang tidak dilakukan secara efektif, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran, meningkatnya jumlah tunggakan pelanggan, hingga risiko piutang tidak tertagih.

PT PLN (Persero) sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan berperan penting dalam menyediakan energi listrik bagi masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, PT PLN (Persero) menerapkan sistem pembayaran listrik prabayar dan pascabayar. Pada sistem pascabayar, pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada periode berikutnya, sehingga menimbulkan piutang usaha bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan piutang menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon, pembayaran tagihan listrik dilakukan setiap bulan dalam periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Pelanggan yang melakukan pembayaran melebihi batas waktu akan dikenakan denda keterlambatan dan sanksi berupa pemutusan sementara aliran listrik. Meskipun perusahaan telah menetapkan kebijakan tersebut, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan piutang usaha. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran arus kas perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko piutang tidak tertagih apabila terjadi secara terus-menerus. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan piutang usaha memerlukan dukungan tata kelola perusahaan yang baik agar proses pengawasan, pencatatan, dan penagihan piutang dapat berjalan lebih efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan GCG memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rintjap et al., 2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan kualitas informasi kas pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon sehingga informasi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diandalkan. Penelitian (Maharani et al., 2024) juga menyatakan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan secara umum, seperti profitabilitas, kualitas laporan keuangan, dan nilai perusahaan. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara penerapan prinsip-prinsip GCG dengan pengelolaan piutang usaha masih relatif terbatas, terutama pada perusahaan sektor ketenagalistrikan. Selain itu, penelitian mengenai pengelolaan piutang umumnya lebih berfokus pada aspek teknis penagihan dan pengendalian internal tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan tata kelola perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan piutang usaha pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Tomohon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola perusahaan dan akuntansi keuangan, serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang usaha melalui penerapan prinsip-prinsip GCG.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu kerangka sistem dalam pengelolaan perusahaan yang mengatur keterkaitan antara pihak manajemen, para pemegang saham, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya demi terselenggaranya aktivitas usaha yang efektif dan penuh tanggung jawab. Implementasi GCG diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mampu membangun kepercayaan para stakeholder terhadap perusahaan (Aliyah et al., 2023). Di samping itu, tata kelola yang diterapkan secara baik turut berperan dalam memperkuat mekanisme pengendalian internal serta menekan potensi terjadinya penyimpangan dalam aspek pengelolaan keuangan.

Dalam praktiknya, Good Corporate Governance berlandaskan pada lima prinsip pokok, yakni transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness (Sitanggang et al., 2025). Prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan perusahaan dalam menyajikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas menekankan pentingnya kejelasan peran dan tanggung jawab dari setiap elemen dalam organisasi. Responsibility menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, sementara independensi menuntut pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Adapun fairness mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan Good Corporate Governance membawa sejumlah keuntungan strategis bagi perusahaan, antara lain peningkatan kualitas pengawasan, penguatan sistem pengendalian internal, perbaikan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta pemeliharaan reputasi perusahaan di mata publik. Perusahaan yang berhasil mengimplementasikan tata kelola secara konsisten pada umumnya memiliki struktur manajemen yang lebih tertata, sehingga mampu menopang keberlanjutan bisnis dalam rentang waktu yang panjang.

Pengelolaan Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha termasuk dalam aset lancar karena umumnya memiliki jangka waktu pelunasan kurang dari satu tahun (Suprapti et al., 2022). Dalam kegiatan operasional perusahaan, piutang usaha memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan arus kas dan likuiditas perusahaan (Rusiyati, 2025) menjelaskan bahwa pengelolaan piutang usaha merupakan proses pengendalian dan pengawasan terhadap piutang agar pembayaran dari pelanggan dapat diterima tepat waktu. Pengelolaan piutang meliputi beberapa tahapan, seperti pencatatan piutang, pemantauan umur piutang, penagihan, hingga penyelesaian piutang bermasalah.

Pengelolaan yang baik diperlukan untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran maupun piutang tidak tertagih yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan piutang usaha. Pengawasan yang efektif dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko piutang bermasalah lebih awal sehingga tindakan penagihan dapat dilakukan secara tepat. Dengan demikian, pengelolaan piutang usaha yang baik dapat membantu menjaga stabilitas arus kas dan mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Hubungan Good Corporate Governance dengan Pengelolaan Piutang Usaha

Penerapan GCG memiliki hubungan erat dengan efektivitas pengelolaan piutang usaha. Prinsip transparansi memungkinkan perusahaan menyajikan informasi piutang secara terbuka dan akurat sehingga mempermudah proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Selain itu,

prinsip akuntabilitas membantu memperjelas tanggung jawab setiap pihak dalam proses pencatatan dan penagihan piutang (Johanto et al., 2025).

Prinsip *responsibility* dan independensi juga berperan penting dalam pengelolaan piutang usaha. *Responsibility* menekankan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan piutang, sedangkan independensi memastikan bahwa keputusan terkait pemberian kredit dan penagihan dilakukan secara objektif tanpa adanya konflik kepentingan. Adapun prinsip *fairness* berkaitan dengan perlakuan yang adil kepada seluruh pelanggan dalam penerapan kebijakan perusahaan.

Dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* dapat mendukung pengelolaan piutang usaha yang lebih efektif melalui peningkatan transparansi, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap aktivitas keuangan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam proses pengelolaan piutang usaha di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Tomohon. Pendekatan deskriptif juga dipilih guna memaparkan kondisi aktual di lapangan terkait penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan piutang usaha (Ulum & Suryatimur, 2022).

Lokasi penelitian bertempat di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Tomohon yang berkedudukan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2025.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui kegiatan wawancara serta observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan piutang usaha. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai referensi pendukung, meliputi jurnal ilmiah, literatur buku, serta dokumen internal perusahaan yang relevan dengan topik Good Corporate Governance dan pengelolaan piutang usaha.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dijalankan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan piutang usaha yang berlangsung di perusahaan. Wawancara dilaksanakan dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses tersebut. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen dan data pendukung yang berkaitan erat dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Hidayat et al., 2025). Rangkaian tahapan tersebut ditempuh untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak penerapan Good Corporate Governance terhadap pengelolaan piutang usaha pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Tomohon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT PLN (Persero) ULP Tomohon

PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon adalah unit operasional yang bergerak di bidang penyediaan dan pelayanan tenaga listrik bagi warga Kota Tomohon beserta

wilayah sekitarnya. Sebagai entitas yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan ini mengemban tanggung jawab dalam memastikan stabilitas distribusi listrik serta terus meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada para pelanggan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya, PT PLN (Persero) ULP Tomohon melayani pelanggan melalui dua skema, yaitu sistem Prabayar dan sistem Pascabayar. Pada sistem pascabayar, pelanggan diberikan kemudahan untuk menikmati aliran listrik terlebih dahulu dan baru melakukan pembayaran pada akhir periode pemakaian. Mekanisme ini berpotensi menimbulkan piutang usaha manakala pelanggan mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tagihan listriknya. Di samping menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada pelanggan, perusahaan juga melaksanakan berbagai kegiatan administratif, meliputi pencatatan angka meter listrik, pengelolaan tagihan, proses penagihan piutang, serta pemantauan terhadap tunggakan pelanggan yang dilakukan melalui sistem administrasi internal perusahaan.

Analisis Prosedur Pengelolaan Piutang pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon

Pengelolaan piutang pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu timbulnya piutang, penagihan, monitoring, dan penanganan piutang bermasalah. Piutang muncul akibat pelanggan pascabayar tidak melakukan pembayaran tagihan listrik sesuai batas waktu yang telah ditentukan perusahaan. Proses awal dimulai dari pencatatan penggunaan listrik pelanggan oleh petugas pencatat meter setiap bulan. Data tersebut kemudian diolah oleh bagian Transaksi Listrik (TL) untuk menentukan jumlah tagihan pelanggan berdasarkan tingkat pemakaian listrik dan golongan tarif. Selanjutnya, tagihan diterbitkan dan pelanggan diberikan waktu pembayaran mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulan. Jika pelanggan belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo, maka sistem perusahaan secara otomatis mencatat tagihan tersebut sebagai piutang dan pelanggan dikenakan biaya keterlambatan. Dalam proses penagihan, perusahaan menerapkan prosedur bertahap melalui penerbitan surat peringatan, pencabutan MCB, pencabutan meter listrik, hingga pembongkaran instalasi listrik apabila pelanggan tidak melunasi kewajibannya. Selain itu, monitoring piutang dilakukan menggunakan aplikasi Executive Information System (EIS) yang berfungsi untuk memantau data tunggakan pelanggan secara *real-time*. Penggunaan sistem tersebut membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi piutang pelanggan secara lebih terstruktur.

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Piutang Pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon

Penerapan GCG pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan piutang usaha yang telah dilakukan secara terstruktur dan mengikuti prosedur perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting dalam pengelolaan piutang usaha karena berkaitan langsung dengan pengawasan pembayaran pelanggan, pengendalian internal, dan kelancaran arus kas perusahaan. Dalam praktiknya, PT PLN (Persero) ULP Tomohon telah menerapkan kelima prinsip utama GCG, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dijangkau oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip ini menjadi penting agar pengelolaan perusahaan dapat berlangsung secara terbuka dan memudahkan proses pengawasan terhadap berbagai aktivitas operasional yang berjalan. Pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon, perwujudan prinsip transparansi tampak dari penggunaan aplikasi Executive Information System (EIS) sebagai instrumen utama dalam pengelolaan piutang usaha. Sistem ini difungsikan untuk memantau berbagai data secara terpadu, mencakup informasi tagihan pelanggan, besaran tunggakan, biaya keterlambatan, serta status pembayaran pelanggan

secara real time. Keberadaan sistem tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh informasi piutang secara cepat dan akurat, sehingga proses monitoring dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain mendukung fungsi pengawasan internal, pemanfaatan sistem EIS juga memberikan kemudahan bagi bagian administrasi dan penagihan dalam mengidentifikasi pelanggan yang mengalami keterlambatan pembayaran. Data yang tersaji secara sistematis dalam aplikasi tersebut membantu perusahaan dalam menentukan langkah penagihan yang lebih tepat sasaran dan terencana. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi di PT PLN (Persero) ULP Tomohon telah berkontribusi dalam menciptakan tata kelola piutang usaha yang lebih terbuka, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap aktivitas perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sehingga meminimalkan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon, prinsip akuntabilitas diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas dalam proses pengelolaan piutang usaha. Petugas pencatat meter bertanggung jawab melakukan pencatatan penggunaan listrik pelanggan setiap bulan. Selanjutnya, bagian Transaksi Listrik (TL) bertugas mengolah data pemakaian listrik dan menentukan jumlah tagihan pelanggan berdasarkan tarif yang berlaku. Setelah itu, bagian administrasi dan penagihan melakukan monitoring pembayaran pelanggan serta melaksanakan penagihan terhadap pelanggan yang memiliki tunggakan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan dalam proses pengelolaan piutang usaha. Kondisi tersebut membantu perusahaan menciptakan sistem kerja yang lebih tertib, mempermudah pengawasan, serta meningkatkan efektivitas pengendalian piutang perusahaan.

3. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap aturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan dituntut untuk menjalankan aktivitas operasional secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip responsibilitas pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon terlihat melalui pelaksanaan prosedur penagihan piutang sesuai standar operasional perusahaan. Pelanggan diberikan batas waktu pembayaran tagihan listrik dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulan. Kalau pelanggan melewati batas waktu pembayaran, maka perusahaan akan mengenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan penagihan secara bertahap melalui penerbitan surat peringatan tools VI-01, VI-02, dan VI-03 kepada pelanggan yang masih menunggak pembayaran. Jika pelanggan tetap tidak melunasi tagihan, perusahaan dapat melakukan tindakan lanjutan berupa pencabutan MCB, pencabutan meter listrik, hingga pembongkaran instalasi listrik pelanggan. Pelaksanaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga pengendalian piutang dan stabilitas penerimaan kas perusahaan.

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi menekankan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun konflik kepentingan dari pihak tertentu. Prinsip ini bertujuan menjaga profesionalisme perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon, prinsip independensi terlihat dalam proses pengelolaan dan penagihan piutang yang dilakukan berdasarkan data pembayaran

pelanggan yang tercatat dalam sistem perusahaan. Seluruh tindakan penagihan dilakukan sesuai prosedur perusahaan tanpa adanya perlakuan khusus kepada pelanggan tertentu. Penerapan prinsip independensi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melaksanakan proses penagihan secara profesional dan objektif. Keputusan terkait penagihan maupun pemberian sanksi dilakukan berdasarkan kondisi pembayaran pelanggan, bukan dipengaruhi oleh hubungan pribadi ataupun kepentingan tertentu. Dengan demikian, pengelolaan piutang dapat berjalan lebih adil dan sesuai ketentuan perusahaan.

5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *fairness* berkaitan dengan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Perusahaan harus menerapkan aturan yang sama kepada seluruh pelanggan tanpa adanya diskriminasi. Penerapan prinsip *fairness* pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon terlihat melalui pemberlakuan aturan pembayaran dan sanksi yang sama kepada seluruh pelanggan. Pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan perusahaan tanpa membedakan status pelanggan. Selain itu, seluruh pelanggan yang memiliki tunggakan juga dikenakan prosedur penagihan yang sama sesuai tahapan yang berlaku di perusahaan. Penerapan prinsip *fairness* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menjaga keadilan dalam pengelolaan piutang usaha. Dengan adanya perlakuan yang sama kepada seluruh pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan kedisiplinan pembayaran pelanggan serta mendukung efektivitas pengendalian piutang usaha.

Keterlambatan pembayaran pelanggan pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon menunjukkan bahwa pengelolaan piutang usaha memerlukan pengawasan dan pengendalian yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tercermin melalui penggunaan aplikasi EIS dalam pemantauan piutang, adanya prosedur penagihan, serta pembagian tugas dalam pengelolaan piutang usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG mendukung proses pengelolaan piutang pada perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) ULP Tomohon telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan piutang usaha melalui proses pencatatan, penagihan, pengawasan, dan monitoring piutang sesuai prosedur perusahaan. Penerapan prinsip transparansi terlihat melalui penggunaan aplikasi EIS dalam memantau data pembayaran pelanggan secara real time. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas antarbagian perusahaan, sedangkan prinsip responsibilitas terlihat pada pelaksanaan prosedur penagihan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan perusahaan.

Selain itu, prinsip independensi diterapkan melalui proses penagihan yang dilakukan secara objektif berdasarkan data pembayaran pelanggan tanpa adanya perlakuan khusus. Prinsip *fairness* juga terlihat dari penerapan aturan dan sanksi yang sama kepada seluruh pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran.

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan piutang usaha mencerminkan adanya komitmen perusahaan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap keterlambatan pembayaran pelanggan, yang diwujudkan melalui penerapan sistem monitoring serta prosedur penagihan yang terstruktur. Berdasarkan temuan penelitian, proses pengelolaan piutang usaha pada PT PLN (Persero) ULP Tomohon secara umum telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta pembagian tugas yang berlaku di lingkungan

perusahaan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah hambatan yang mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan monitoring piutang, sehingga pengelolaan piutang usaha ke depannya dapat berlangsung secara lebih optimal dan terarah.

DAFTAR REFERENSI

- Aliyah, D., Bangun, M., Persi, C., & Azzahra, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 24(4), 62–80. <https://doi.org/10.51510/polimedia.v24i4.1364>
- Hidayat, R., Fitri, R., & Hermina, D. (2025). Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 509–523.
- Johanto, I., Fadilah, A., Anggraini, D., & Kusumaningtias, R. (2025). Evaluation Of The Implementation And Effectiveness Of Good Corporate Governance In State-Owned Enterprises: A Case Study Of Pelindo As A Recipient Of The “Indonesia Trusted Companies 2024” Award. *Neraca Manajemen, Akuntansi*, 17(5), 1–14.
- Maharani, E., Akbar, A., Maheswari, J., & Suwarsit. (2024). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 384–393. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2647>
- Rintjap, T., Langi, T., & Kumaat, L. (2025). Analisis Dampak Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Atas Informasi Kas Pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (Ulp) Tomohon. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(September), 211–225.
- Rusiyati. (2025). *Determinasi Likuiditas Perusahaan : Kajian Literatur pada Peran Arus Kas, Struktur Modal, Piutang dan Kondisi Ekonomi*. 2(4), 185–198.
- Sitanggang, H., Sitanggang, M., & Yunita, R. (2025). Evaluasi Prinsip Good Corporate Governance Di Pt Aneka Tambang Tbk : Studi Kualitatif Terhadap Transparansi Dan Tanggung Jawab Sosial Tahun 2020-2023. *Manajemen Bisnis Dan Inovasi Sistem*, 1(2), 89–96.
- Suprapti, E., Budiyah, F., Pertiwi, D., Alamanda, A., & Tampubolon, Endy Ferdawati Amani, Tatik Yuliana Narulita, Sari Sunrowiyati, Siti Rahayu, Eka Rahmansyah, Ahmad Sejati, Fajar Perwitasari, D. (2022). *Pengantar Auntansi 2* (S. Bahri (ed.)). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sutriani, Hamdiah, & Jumadiah. (2025). *Good Corporate Governance*. Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia. https://books.google.com/books/about/GOOD_CORPORATE_GOVERNANCE.html?hl=id&id=PeVhEQAAQBAJ
- Ulum, S., & Suryatimur, K. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>